

COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT IN PESANTREN PONDOK DALWA BASED ON SUMMATIVE CIPP EVALUATION MODEL¹

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI PONDOK PESANTREN DALWA BERDASARKAN MODEL EVALUASI SUMATIF CIPP

Yunita Nur Laili F.M., Irham Zaki

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
yunita.nur.laili-2016@feb.unair.ac.id*, irham-z@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Pondok pesantren memiliki peran sebagai pemberdaya masyarakat dalam bidang ekonomi. Salah satu pesantren yang mengimplementasikan peran tersebut adalah pesantren Darullughah Wadda'wah. Pesantren tersebut memiliki 14 unit usaha, namun tidak semua dikelola secara profesional. Pengelolaan yang dilakukan secara profesional oleh masyarakat yang berkompeten dan dapat ditemukan di pusat bisnis DALWA yang meliputi hotel, ritel (mart), tour and travel, roti, dan fried chicken saja. Penelitian ini menggunakan model evaluasi sumatif CIPP (Context, Input, Process, Product yang melaporkan anteseden, implementasi, dan dampak program. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesantren Darullughah Wadda'wah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Kemudian, data divalidasi dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan anteseden program yaitu dilakukan di pesantren DALWA karena faktor kemandirian, kepercayaan, dan dakwah. Selanjutnya, pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk masyarakat umum terutama laki-laki yang berkompeten, ikhlas, dan amanah. Pemberdayaan dilakukan melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Hasil adanya pemberdayaan dapat tercermin dalam bidang bina manusia, usaha, lingkungan, dan kelembagaan. Dampak pemberdayaan adalah positif untuk pihak pemberdaya dan masyarakat.

Kata Kunci: model evaluasi sumatif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pondok pesantren Darullughah Wadda'wah

ABSTRACT

Pondok pesantren is an institution that can contribute to empowering the community's economy through its business units. The effort was apparently carried out by Pondok Pesantren DALWA. This institute has 14 businesses, but not all of them have professional management, there are a hotel, mart, tour and travel, bread, and fried chicken. This research uses a summative evaluation model. It has four components are context, input, process, product. This model will report the reason, implementation, and result of empowerment. The purpose of this research was to analyze the model of community economic empowerment in the league. The research method is qualitative.

Informasi artikel

Diterima: 24-01-2020

Direview: 30-05-2020

Diterbitkan: 14-07-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Yunita Nur Laili F.M.

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Yunita Nur Laili F.M., NIM: 041611433104, yang berjudul, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, Kabupaten Pasuruan."

Data collected through observations, interviews and documents. The data is validated by the triangulation of sources and techniques. The result showed the reason for empowerment because of independence, reliance, and da'wah. The program gives priority to male are competent, sincere, and amanah. This program consists of awareness, capacity, and making efficient use based on Islam. It is very useful for individual ability, effort, environment, and league. All of these empowerment cause positive impact to pesantren and society

Keywords: Summative evaluation model, the community economic empowerment, Pondok pesantren Darullughah Wadda'wah

I. PENDAHULUAN

Pondok Pesantren merupakan lembaga yang memiliki fungsi utama sebagai tempat belajar ilmu agama Islam secara intensif, pelestarian tradisi Islam dan pencetak lahirnya para ulama di Indonesia (Abdul, 2010). Selain itu, juga membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat (Ali dan Neni, 2019). Pernyataan-pernyataan tersebut sangat relevan dengan tujuan pembangunan pondok pesantren yaitu mencetak generasi yang mendukung terbentuknya masyarakat agamis, bermoral, dan tangguh dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Zulhimma, 2013). Dengan demikian, pondok pesantren menjadi wadah yang strategis dalam tiga hal yaitu keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan (Kementerian Agama, 2018). Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Kementerian Koperasi dan UKM dalam Walfajri (2018) yaitu pondok pesantren dapat mencapai kemandirian melalui pemberdayaan ekonomi umat.

Negara Indonesia memiliki sekitar 28.194 pondok pesantren (Kementerian Agama, 2018). Mayoritas pondok

pesantren tersebut berada di Pulau Jawa yaitu sebesar 82.74% (Kementerian Agama, 2018). Melihat hal tersebut, pemerintah sangat mendukung eksistensi pondok pesantren di masyarakat yaitu melalui pengesahan UU No.18 tahun 2019 tentang pondok pesantren. Apabila pondok pesantren dapat mengembangkan potensinya, maka tidak menutup kemungkinan negara Indonesia akan menjadi negara yang madani, sejahtera, adil, mandiri dan beradab.

Peraturan perundangan mengenai pesantren tersebut secara tidak langsung memberikan amanah kepada pondok pesantren untuk melibatkan masyarakat dan memberdayakan mereka. Oleh karena itu, saat ini terdapat kurang lebih 134 pesantren memiliki unit usaha dan pemerintah ingin mendukung unit usaha tersebut terutama di bidang makanan dan minuman, *fashion*, *tourism*, *agricultural* (Gubernur Bank Indonesia dalam Qolbi (2018)). Selain disebabkan karena adanya amanah yang diberikan, unit usaha tersebut berdiri karena pesantren tidak sepatutnya terus bergantung pada pihak lain, sehingga

mereka harus mandiri dan akhirnya mereka mendirikan unit usaha pesantren.

Saat ini, sudah ada pondok pesantren yang telah melibatkan masyarakat di unit usaha mereka, seperti: Ponpes Sidogiri, Ponpes Sunan Drajat, Ponpes DALWA, Al-Mawaddah, Ponpes Nurul 'Amal, Ponpes Al-Yasini dan sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut belum optimal. Masih banyak pondok pesantren yang belum melakukan fungsinya dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena fokus terhadap fungsi pendidikan dan dakwah. Padahal, dengan pemberdayaan ekonomi merupakan sarana untuk berdakwah dan melakukan pendidikan. Terlebih lagi, jika mendayagunakan potensi lokal yang ada, pondok pesantren akan mampu membantu mewujudkan *maqashid syari'ah* di masyarakat (Ali dan Neni, 2019; Rahmatika, 2019). Adanya pemberdayaan oleh pondok pesantren pasti akan memberikan dampak positif lebih karena orientasinya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

Pesantren *Darullughah Wadda'wah* merupakan salah satu lembaga yang melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usahanya yang sampai saat ini terus berkembang terutama di bidang makanan, ritel, hotel dan *tourism*. Pengelolaan di bidang tersebut dilakukan secara profesional. Selain itu dilakukan dengan menjadikan Al- Qur'an dan hadits

sebagai pedoman, seperti penerapan pada Surat Al-Baqarah ayat 233 berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

...wa 'alal-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil-ma'ruf...

Artinya: "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...".

Di samping itu, pesantren selalu mendukung ekonomi Islam yaitu menanamkan nilai-nilai Islam kepada karyawan dalam berusaha, penamaan unit usaha selalu diikuti nama pondok pesantren, penjualan produk halal dan tidak makruh di sekitar pesantren, bekerja sama dengan KIH (Korea Institute of Halal Industry) dan YPHI (Yayasan Produk Halal Indonesia) untuk menjadi Pusat Kajian Halal (Soeharto, 2019).

Belum ada yang melakukan penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di pusat bisnis pesantren *Darullughah Wadda'wah* atau yang biasa dikenal dengan DALWA. Padahal pengetahuan tersebut penting untuk diketahui dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pesantren yang masih fokus di bidang pendidikan dan agama saja atau yang mulai melakukan pemberdayaan melalui unit usaha pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk diketahui. Penelitian ini akan menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat dari segi latar belakang dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian atau hasilnya. Keempat

dimensi tersebut dapat diketahui dengan mengacu pada teori Stufflebeam yaitu model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang bersifat sumatif. Model evaluasi tersebut telah banyak digunakan dalam dunia pendidikan namun belum banyak digunakan dalam bidang ekonomi. Padahal jika dikembangkan, akan menghasilkan temuan yang sangat bermanfaat. Hal tersebut seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Muslim (2014) yaitu merumuskan konstruksi model pemberdayaan ideal untuk tiga masjid yang mengambil pada konsep CIPP. Begitu pula dengan Rahmatika (2019) yang menelaah model pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren Sunan Drajat melalui acuan *context, input, process, dan product*. Model evaluasi sumatif CIPP digunakan acuan pada penelitian ini karena menguraikan dan menggambarkan hasil yang sistematis, mudah dipahami, jelas, dan transferabilitas. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap banyak pihak seperti pondok pesantren lain, bahan pertimbangan untuk kebijakan pemerintah, referensi bagi civitas akademik, serta masyarakat umum yaitu sebagai bahan untuk mendukung dan mendakwahkan ekonomi Islam melalui pondok pesantren.

II. LANDASAN TEORI

Pemberdayaan dalam bahasa Arab dikenal dengan *tamkin*. Makna *tamkin* dalam Al-Qur'an memiliki banyak makna yaitu keberdayaan, kekokohan,

kemampuan manusia, memiliki kekuatan, dan pengaruh. Begitu pula dengan Hendra (2017) bahwa *tamkin* berhubungan dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi dan banyak orang tersebut maka semakin tinggi kedudukannya di dunia dan akhirat. Selanjutnya, Putra (2019) menjelaskan terdapat tiga prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan perspektif Al-Qur'an yaitu: *Ukhuwwah islamiyah, ta'awun*, persamaan derajat.

Iwan (2012) mengemukakan definisi pemberdayaan yaitu proses seseorang mendapatkan keterampilan, pengetahuan, kekuasaan yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi maupun orang lain. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan stimulasi, motivasi, dan pengarahan (Hasan dan Azis (2018:137)). Adanya proses tersebut, diharapkan dapat mewujudkan kekuatan untuk bertindak (Schaurhofer dan Markus, 2005). Tindakan tersebut harus dapat menjadi aksi nyata untuk membangun kemampuan masyarakat dan meningkatkan harkat dan martabatnya (Eko dan Riyadh (2014)) sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, menyelamatkan kehidupan masyarakat (Suyono, 2006: 3), dan mewujudkan masyarakat yang mandiri, demokratis dan berbudaya (Suyono, 2006: 11). Tentu saja hal tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan penanaman karakter supaya selalu bekerja keras, hemat, terbuka, bertanggung jawab (Hasan dan Azis, 2018: 139). Tidak hanya itu, tetapi

juga berani mengambil keputusan. Hal tersebut dibutuhkan untuk mencapai keadilan dan pencegahan terhadap dampak negatif sistem feodalisme di segala aspek kehidupan (Saputro, 2011). Selain penanaman karakter, terdapat upaya yang harus dilakukan yaitu: (a) Bina manusia; (b) Bina usaha (Upaya untuk memberikan manfaat lebih dan meningkatkan kesejahteraan); (c) Bina lingkungan; (d) Bina kelembagaan (Terdapat empat komponen yaitu *person*, *kepentingan*, *aturan*, dan *struktur organisasi*) (Mardikanto (2003) dalam Marlina (2014)).

Saat ini, pemberdayaan masyarakat berpusat pada bidang ekonomi (Hasan dan Azis, 2018: 153). Adapun pemberdayaan ekonomi adalah kegiatan memberi kekuasaan pada pihak kedua yaitu yang diberdayakan supaya mampu dalam bidang ekonomi (Nadzir, 2015). Banyak sekali konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai berikut: peningkatan gaji atau upah, kemudahan akses informasi juga pengetahuan dan keterampilan (Yatmo, 2000). Tujuan adanya pemberdayaan tersebut untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang ekonomi baik langsung maupun tidak langsung (Nadzir, 2015). Guna mewujudkannya, maka dibutuhkan peran pemerintah untuk mengefektifkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan, ijin suatu lembaga atau instansi untuk terlibat dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang berhubungan dalam pengentasan kemiskinan (Kholiq, 2012). Selain pemerintah, pondok pesantren juga menjadi wadah untuk melakukan pemberdayaan. Berbeda dari lembaga lain, pemberdayaan di pesantren juga menanamkan citra positif Islam yang anti kekerasan dan berkemanusiaan tinggi di masyarakat (Ni'am, 2015), dan senantiasa berbuat kebaikan dan melakukan ibadah kepada Allah SWT. (Izfanna dan Nik, 2012).

Terdapat model pemberdayaan ekonomi yang sejauh ini sudah diterapkan di pondok pesantren (Nadzir, 2015): (1) Berpusat pada kyai sebagai penanggung jawab untuk mengembangkan pesantren, (2) Bertujuan untuk memperkuat dan mendukung biaya operasional pesantren melalui unit usaha produktif, (3) Memberi ketrampilan dan kemampuan pada santri melalui program pendidikan, (4) Usaha untuk para alumni santri yaitu pengurus pondok pesantren bekerja sama dengan alumni santri.

Penelitian ini menggunakan model CIPP yang bersifat sumatif karena dapat memberikan informasi dengan mudah dan sistematis kepada pembaca mengenai manfaat program yang meliputi landasan, perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program (Stufflebeam, 2003). Dimana, CIPP terdiri dari (Stufflebeam dalam Zhang, dkk, 2011): (a) *Context* (Berisi latar belakang atau masalah dasar, konteks, target dan peluang keberhasilan suatu program), (b) *Input* (Berisi modal awal yang dibutuhkan,

strategi, prosedur), (c) *Process* (Bertujuan untuk mengetahui proses suatu program dan peran pihak yang terlibat dalam program), (d) *Product* (mengetahui dampak dari suatu program dan keberlanjutan program serta memberi wawasan yang bersifat transferabilitas). Kemudian di berikan pertanyaan pendukung sebagai berikut:

1. Apakah permasalahan yang ada penting untuk ditangani?
2. Apakah upaya yang dipandu oleh rencana yang bias dipertahankan?
3. Apakah desain layanan dilaksanakan secara kompeten dan bias dimodifikasi?
4. Apakah usahanya berhasil?

Kemudian, dalam evaluasi sumatif harus melaporkan tiga hal berikut yaitu: (1) Antecedent program (Menginformasikan latar belakang dan tempat program dilaksanakan); (2) Implementasi program (Menginformasikan mengenai penerima program, tujuan, prosedur, pengelolaan dan fasilitas, dan sebagainya dalam rangka memberikan rincian program); (3) Hasil program (Penilaian komprehensif oleh audiensi yang berasal dari keempat komponen yaitu *context*, *input*, *process*, *product*).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus karena peneliti melakukan hal berikut:

1. Mendeskripsikan realita yang dapat memberikan stimulus akademisi lain untuk mengkaji ilmu sesuai disiplin ilmu masing-masing (Somantri, 2005)

2. Hasil penelitian kualitatif berasal dari deskripsi kata dan gambar, bukan berupa angka. (Saeful, 2009).
3. Mengkaji di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu, tidak membutuhkan populasi dan sampel karena tidak dimaksudkan untuk generalisasi tetapi transferabilitas (Rahardjo, 2017).
4. Jenis penelitian tersebut cocok digunakan untuk menggali aktivitas yang dapat berupa program, kejadian, proses, dan kelompok sosial (Abdullah dan Beni, 2014: 71), yang mana dalam penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Data ini diperoleh dari sumber data primer karena berasal dari informan secara langsung (Muhammad, 2008), melalui wawancara (*Purposive* dan *snowball*) dan observasi (Hasanah, 2016). Data diperoleh langsung dari pihak pondok pesantren DALWA yang mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan masyarakat yang diberdayakan. Selain itu, juga berasal dari data sekunder karena didapatkan melalui dokumentasi (Setiap proses pembuktian didasarkan pada sumber apapun baik yang bersifat tulisan, lisan, dan gambar) (Nilamsari, 2014). Adapun teknik analisis data menggunakan *Explanation Building* dan *pattern matching*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok pesantren *Darullughah Wadda'wah* adalah pesantren yang didirikan oleh Ustadz Hasan Baharun. Ma'had tersebut didirikan pada tahun

1981. Beliau memiliki enam putra dan dua putri yang meneruskan dakwah beliau (Keluarga Besar "Al Hasaniyah", 2012: 4). Pondok pesantren yang terkenal dengan sebutan DALWA itu berada di Jl. Raya Raci No.51, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur yang mana saat ini memiliki lahan kurang lebih seluas 11,5 ha dan mengasuh sekitar 11.000 santri. Tujuan berdirinya ponpes tersebut terdapat dalam akta pendirian yayasan DALWA No.20 tahun 2007 yaitu sebagai lembaga yang bergerak pada bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan, keagamaan, ekonomi, kesejahteraan. Oleh karena itu, visi dan misi yang dimiliki sangat berkaitan dengan hal tersebut.

Saat ini, kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren masih berjalan dan nama DALWA semakin terkenal di masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Eksistensi tersebut tidak terlepas karena adanya unit usaha pondok yang mendukung pondok dalam segi ekonomi dan kesejahteraan. Adapun unit usaha yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah yang berada di area DALWA Center yaitu hotel, ritel, *tour* dan *travel*, roti, dan DFC. Hal tersebut karena alasan berikut: (a) Memberdayakan masyarakat yang beragam yaitu sebagai kelompok I (Pegawai yang ahli, berasal dari masyarakat umum melalui pemberian tidak digaji (Berkhidmat)), dan kelompok II (Masyarakat umum melalui rekrutmen, dan digaji); (b) Memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan pesantren; (c) Segmentasi pasar adalah untuk internal dan eksternal

pondok; (d) Mengimplementasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara profesional dan beragam untuk mencapai keempat bidang bina pemberdayaan; (e) Strategis dan merupakan usaha yang mendukung perkembangan ekonomi Islam.

Model evaluasi sumatif CIPP berarti bentuk evaluasi yang diperoleh dari komponen *context*, *input*, *process*, *product* yang hasilnya nanti memuat antesedan, implementasi, dan dampak program, dalam hal ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut uraiannya:

Komponen Context

Komponen context membahas tentang identifikasi masalah yang mendasari program pemberdayaan, target dan peluang keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun latar belakang dari upaya tersebut yaitu kemandirian, tujuan pembangunan (Amanah), pelaku pengembangan ekonomi Islam. Pertama, seiring berkembangnya zaman, harga barang terus mengalami peningkatan, namun tidak mungkin bagi pondok pesantren untuk mengenakan biaya yang semakin besar kepada orang yang ingin menuntut ilmu agama. Di samping itu, sebagai lembaga yang dijadikan teladan bagi masyarakat, tidak mungkin mengadahkan tangan kepada pihak luar pondok pesantren untuk menghidupinya. Oleh karena itu, pondok pesantren DALWA harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur

tangan dari pihak luar. Dalam hal tersebut adalah yang bersifat materi karena tidak semua pihak yang membantu keuangan pondok itu ikhlas. Sedangkan keikhlasan merupakan modal utama untuk mendapatkan keberkahan. Selain itu, terdapat prinsip yang dipegang untuk mendukung faktor kemandirian di pesantren ini yaitu:

1. Muslim yang kuat lebih di cintai oleh Allah
Pesantren ini sangat memegang teguh Al-Qur'an dan hadits dalam bermuamalah, seperti halnya dalam melakukan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat. Pihak pemberdaya memegang teguh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

...الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ...

Arti: "...Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih di cintai Allah..."

Mukmin itu tidak boleh lemah, tapi harus kuat. Kuat fisik, pikiran, pendidikan, termasuk dalam hal ini yaitu ekonominya. Pendidikan merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan pemberdayaan. Mana mungkin dapat sekolah tinggi jika biayanya tidak tersedia. Maka dari itu, salah satu prinsip adanya unit usaha di pesantren tersebut adalah membantu santri untuk berpendidikan tinggi.

Hal tersebut sama seperti pemberdayaan dalam islam yang disampaikan oleh Hendra (2017)

bahwa pemberdayaan harus diawali dengan hal keimanan dan ilmu. Ilmu tentunya akan di peroleh dari pendidikan. Semakin tinggi pendidikan maka kemungkinan besar akan menjadi orang yang berdaya dan memberikan kemanfaatan bagi banyak orang.

2. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga menjadi pedoman dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى

Arti: "Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah."

Pada prinsip ini, pesantren DALWA ingin menjadi contoh terhadap para santri dan masyarakat. Sebagai muslim yang percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak boleh mengandalkan pemberian orang lain. Namun, harus mandiri terutama sebagai modal dalam mencari ilmu agama.

Unit usaha di pesantren DALWA tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja. Namun, untuk bermanfaat bagi banyak orang. Unit usaha tersebut dibangun untuk membangun paradigma berfikir masyarakat supaya mandiri. Hal itu tidak terlepas dari adanya motif pesantren sebagai berikut (Nadzir, 2015):

- a. Motif agama yaitu kemiskinan tidak sesuai dengan ekonomi Islam.
- b. Motif sosial yaitu sebagai tokoh di daerah tersebut, kyai harus mengatasi permasalahan di masyarakat termasuk di bidang ekonomi
- c. Motif politik yaitu Pondok pesantren memiliki *image* yang baik dan tinggi di masyarakat setempat, dan pondok pesantren harus berupaya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kedua, dalam UU No.18 tahun 2019 pemerintah secara tidak langsung mengamankan pondok pesantren melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Begitu pula dengan tujuan pendirian pondok DALWA yang tercantum di akta pendirian yayasan No. 20 tahun 2007 menyebutkan tujuan pembangunan pesantren adalah untuk bergerak di enam bidang yaitu pendidikan, sosial, kemanusiaan, keagamaan, ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ponpes DALWA memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi melalui unit usaha pondok pesantren.

Ketiga, sebagai lembaga dakwah pondok pesantren DALWA juga harus mengimplementasikan dan memperkenalkan ekonomi dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Hal tersebut karena pondok pesantren merupakan sarana untuk mencapai

maqashid syari'ah di masyarakat (Ali dan Neni, 2019). Komitmen pesantren tersebut dapat dilihat melalui batu prasasti pendirian unit usaha di pusat bisnis DALWA (DALWA Center).

Meskipun tujuan utama DALWA meliputi enam bidang, namun pada kenyataannya memprioritaskan bidang pendidikan. Namun, karena adanya amanah maka pelaksanaan bidang lain khususnya ekonomi dan kesejahteraan harus tetap dijalankan. Oleh sebab itu, pihak pondok pesantren memberikan kepercayaan dan kesempatan kerja kepada masyarakat umum. Perlu diketahui bahwa pesantren DALWA hanya menolak bantuan dari pihak luar dalam bentuk materi. Namun, di luar itu pondok pesantren sangat terbuka terutama jika bantuan tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat yang diberdayakan. Saat ini, usaha yang ada di pondok semakin berkembang dan banyak dukungan non materi dari berbagai macam pihak tentu saja akan mendukung keberhasilan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komponen Input (Modal Awal)

1. Ghiroh

Faktor ini dilakukan dari pimpinan ke bawahan maupun sesama pegawai (Bawahan). Aspek ini dalam pemberdayaan juga disebut dengan *enabling*. *Enabling* merupakan upaya untuk memotivasi dan membangkitkan kesadaran potensi

yang dimiliki oleh mereka (Mardikanto dan Poerwoko, 2013: 43-44). Penanaman dan peningkatan ghiroh dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Maksud langsung adalah diberikan secara lisan maupun perbuatan seseorang yang disaksikan secara langsung oleh orang lain tanpa melalui perantara. Ghiroh atau semangat untuk menjadi bagian dalam pengembangan pondok pesantren ini diberikan oleh pengasuh pondok dan pengurus DALWA Center. Sementara, ghiroh yang tidak langsung timbulnya dari dalam diri sendiri tanpa melalui perantara pihak pondok. Namun, bisa jadi karena adanya faktor kepercayaan keimanan, dan keempatian seseorang.

2. Sumber Daya Manusia

Pihak pondok pesantren yaitu direktur DALWA Center dan pengurus DALWA Center memberikan kepercayaan kepada orang yang amanah, berkomitmen tinggi dan berkompeten dan berakhlak baik di bidangnya yaitu bidang perhotelan, ritel, pariwisata, snack, dan makanan. Mereka akan mengajak orang yang dipercaya untuk menduduki posisi penting di setiap unit bisnis. Selain itu, mereka juga melakukan rekrutmen terbuka untuk masyarakat umum. Rekrutmen terbuka tersebut dilakukan seperti pada umumnya yaitu tes tulis dan tes wawancara. Kemudian,

orang kepercayaan pondok tersebut memberikan ilmu dan pengetahuan kepada pegawai yang masuk tersebut. Selanjutnya, di bentuk tim leader atau tim senior untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada pegawai baru selanjutnya yang baru masuk.

3. Aset Bisnis

Aset dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesantren DALWA. Adapun aset yang dibutuhkan adalah uang, bangunan (gedung) unit usaha. Aset yang diperoleh di pondok pesantren tidak didapatkan dengan cara instan. Namun, secara bertahap, sedikit demi sedikit Selain itu, mereka mampu menangkap apa yang dibutuhkan oleh pihak internal pondok dan juga eksternal pondok. Mereka tidak membutuhkan perhitungan secara ekonomi dan juga studi kelayakan bisnis, analisis SWOT serta sebagaimana pendirian usaha pada umumnya. Namun, pondok pesantren menggunakan insting yang berdasarkan pada istikharah, petunjuk langsung dari Allah SWT. Bagi ponpes DALWA, apapun aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan maka mereka akan melibatkan Allah. Selain itu, mereka juga saling bermusyawarah. Hal tersebut ternyata mengacu pada HR. Thabrani dalam buku Kinoyan (2007: 183) yang artinya tidak akan kecewa orang

yang shalat istikharah, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan kekurangan orang yang hemat. Oleh karena itu, meskipun dengan modal Rp 50.000.000,00 mereka dapat mengoptimalkan pembangunan unit usaha yang menjadi pusat bisnis pondok pesantren DALWA.

4. *Goodwill*

Nama baik pesantren atau *goodwill* atau citra positif pesantren DALWA di masyarakat harus baik. Hal tersebut karena akan memberikan dampak yang positif dan luar biasa terhadap keberadaan unit usaha pondok pesantren. Pesantren DALWA tidak perlu bersusah payah untuk mencari orang yang mau bekerja di pondok tersebut, tetapi masyarakat yang membutuhkan yang datang dan dengan ikhlas mau bekerja juga berkhidmat di pesantren tersebut.

Pada kenyataannya, citra positif tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Citra tersebut telah dibangun sebelum pondok DALWA berdiri yaitu ustadz Hasan Baharun, pendiri pondok pesantren telah menyebarkan benih-benih kebaikan di seluruh wilayah Indonesia maupun manca negara. Sehingga, dengan sifat dan sikapnya yang mulia tersebut Allah membantu beliau dalam menyebar luaskan nama DALWA ke penjuru dunia. Selain itu, Oleh karena itu, hingga saat ini pondok pesantren DALWA terus menerus berkembang

pesat. Bukan hanya dikenal dari segi pendidikan saja tetapi juga di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

5. Dukungan dan sinergitas

Dukungan dan sinergitas berasal dari berbagai macam pihak baik internal pondok (Santri, guru, wali santri, pengasuh pondok, keluarga dan sahabat pengasuh pondok) maupun eksternal (Pemerintah, lembaga dan masyarakat umum).

Komponen Input (Strategi)

Modal awal saja tidak cukup untuk menjalankan program pemberdayaan. Pesantren DALWA juga memiliki strategi tertentu dalam komponen input sebagai berikut:

1. Menyinergikan semua komponen yang terdapat dalam modal awal tersebut.
2. Selalu melakukan istikharoh sebelum mengambil keputusan yang besar.
3. Selalu menanamkan nilai akhlaq dan moralitas kepada orang yang bekerja (Mendapatkan gaji) dan atau berkhidmat (Tidak mendapatkan gaji) di pondok.

Komponen Process

Komponen *process* membahas rangkain implementasi pemberdayaan dan peran masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan. Penyadaran merupakan langkah pertama dalam proses pemberdayaan. Penyadaran dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh pondok pesantren. Penyadaran langsung melalui pemberian teladan yang baik kepada masyarakat baik melalui lisan dan

perbuatan. Sedangkan kesadaran tidak langsung melalui nama baik pesantren di masyarakat dan juga tidak ada berita buruk mengenai pesantren DALWA. Sehingga, saat mereka di ajak bekerja di unit usaha pesantren, mereka merasa sangat senang karena menjadi orang yang terpilih untuk turut membangun pondok. Selain itu, mereka rela bekerja dengan ikhlas tanpa menerima gaji atau disebut juga dengan berkhidmat. Setelah kesadaran, proses berikutnya adalah pengkapisitasan.

Pengkapisitasan dilakukan secara berjenjang yaitu manajer setiap unit usaha di area DALWA Center memberikan pengetahuan dan pelatihan (*Training*) kepada pegawai yang baru masuk, selanjutnya jika ada pegawai baru maka yang memberikan pelatihan tidak lagi manajer namun diberikan oleh tim *leader*. Tim tersebut merupakan senior yang diberikan tanggung jawab untuk melatih pegawai baru. Terdapat unit usaha yang memberlakukan *cross training*. Tujuan training tersebut yaitu supaya pegawai dapat belajar dan menambah pengalaman bekerja. Tetapi tidak untuk posisi yang sangat penting seperti koki. Kemudian, pengkapisitasan dapat melalui seminar, workshop, pelatihan khusus. Dalam hal tersebut, pondok pesantren bekerja sama dengan dinas setempat, universitas di Indonesia, maupun pihak profesional yang berasal dari masyarakat umum. Di samping itu, pihak pondok juga memperbolehkan pegawai di pondok untuk mengikuti kajian

dan acara besar pondok pesantren. Selain itu, pengkapisitasan juga dilakukan melalui briefing yang sering dilakukan. Melalui *briefing* tersebut, seluruh pegawai diberikan kesempatan untuk berbicara dan melalui kegiatan tersebut pemimpin menanamkan nilai positif terhadap pegawainya. Tentu saja, hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan mereka.

Proses pemberdayaan berikutnya adalah pendayaan. Pendayaan dilakukan sesuai dengan kebijakan setiap unit usaha. Secara umum berupa gaji, bonus, kelengkapan identitas dan bekerja, pemberian tanggung jawab. Di sisi lain, ada unit usaha yang memberikan fasilitas mes, dan makan siang.

Komponen Product

Komponen selanjutnya adalah *product*. Output yang dihasilkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tercermin dalam empat bidang yaitu:

1. Bina manusia

Masyarakat memiliki kemampuan dan pengalaman yang semakin banyak, dapat menjadi bekal di masa datang, serta menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Unit usaha yang dimiliki oleh pondok pesantren ini tidak hanya menanamkan hal-hal yang bersifat keduniawian saja. Namun, banyak nilai-nilai Islam yang ditanamkan kepada setiap individu yang bekerja di pondok yaitu *istiqomah*, kejujuran, sopan santun (*Tawadhu'*), senantiasa *fastabiqul khoirot*, tidak meninggalkan sholat,

qana'ah dan ikhlas. Tidak hanya itu, pemberdayaan yang dilakukan pondok pesantren ini juga senantiasa diajarkan yaitu selalu bekerja keras dan bertanggung jawab, seperti tujuan pemberdayaan yang dituliskan oleh Hasan dan Azis (2018: 139) bahwa karakter positif seperti tanggung jawab, terbuka, kerja keras harus ditanamkan kepada orang yang diberdaya.

2. Bina usaha

Bentuknya dapat berupa peningkatan keterampilan usaha, teknologi, informasi dan sebagainya. Pondok pesantren DALWA telah bekerjasama dengan berbagai macam pihak. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan sasaran pemberdayaan yaitu pegawai di unit usaha pesantren. Peningkatan keterampilan tersebut seperti cara memasak yang baik dan benar, cara menghadapi pelanggan dan mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan syariat Islam. Adanya keterampilan tersebut akan sangat bermanfaat bagi setiap individu yang melakukan usaha. Dengan kata lain, pondok pesantren telah berhasil menyinergikan antara tujuannya yaitu sebagai wadah untuk dakwah, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan.

3. Bina lingkungan

Terdapat penguatan lingkungan fisik dan sosial. Penguatan fisik diwujudkan dari adanya unit usaha yang

menyuplai kebutuhan unit usaha lainnya sehingga usaha terus berlanjut seperti: Adanya dukungan antar unit usaha pesantren yang ditunjukkan dengan tidak adanya produk roti yang dijual di DALWA *mart*, di DALWA *mart* menjual DALWA *water*, dan produk DALWA *Collection*, DALWA hotel bekerja sama dengan DALWA *mart* untuk memasok kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh hotel dan DALWA *travel* yang menyediakan transportasi untuk para tamu yang datang ke hotel. Kemudian, penguatan lingkungan sosial dapat dilihat dari adanya sinergi antara alumni santri dengan unit usaha di pondok pesantren. Hal tersebut akan menimbulkan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha dan loyalitas masyarakat yang bekerja di unit usaha pondok. Di samping, adanya sikap kooperasi dan mengutamakan nilai kekeluargaan, pegawai di unit usaha pesantren akan saling mendukung satu sama lain demi keberlanjutan usaha.

4. Bina kelembagaan

Adanya sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan dapat berjalan *sustainable*. Bina kelembagaan di pesantren DALWA ini berupa terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan menguatkan satu sama lain antar pelaku ekonomi. Adapun pelaku usaha yang diuntungkan dalam hal ini adalah

para *supplier* yang memasok kebutuhan bahan baku DFC, DALWA roti, DALWA hotel, DALWA *mart*. Kemudian, *home industry* yang bekerja sama dengan DALWA *mart*. Selain dengan pelaku usaha di luar pondok, hubungan yang menguntungkan juga dilakukan antar pelaku usaha di pondok pesantren. Di samping adanya hubungan yang bersifat *mutualism*, bentuk bina kelembagaan adalah adanya perturan yang mendukung terselenggaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu UU.No.18 Tahun 2019 tentang pesantren dan akta pendirian yayasan DALWA No.20 tahun 2007 yang terkandung dalam tujuan pendirian yayasan pondok pesantren DALWA. Selain itu, saat ini unit usaha DALWA lebih terorganisir karena adanya DALWA *Center* yang menanungi. Unit usaha di pusat bisnis DALWA tersebut di jalankan oleh masyarakat umum, sehingga terdapat aturan yang tegas dan terikat. Adanya SOP, struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab juga sudah ada di unit usaha di pesantren tersebut.

Selain output, ada juga dampak outcome yaitu jangka panjang sebagai berikut: (a) Pondok pesantren semakin berkembang di segala sisi dan tidak bergantung kepada siapapun; (b) Pondok pesantren mampu memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

secara intens, khususnya pemuda di daerah Pasuruan dan sekitarnya baik melalui pemberdayaan secara langsung maupun tidak langsung; (c) Pondok pesantren mampu mengembangkan unit usaha dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat yang bekerja dan atau berkhidmat di unit usaha ponpes. Dengan kata lain terbentuknya generasi tangguh yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai Islam di masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat diketahui hal-hal berikut:

Tabel 1.
Laporan Evaluasi Sumatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pondok Pesantren DALWA

Bagian Laporan	Keterangan
Anteseden program: latar belakang dan tempat program	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan di pondok pesantren Darullughah Wadda'wah itu dilatarbelakangi karena kebutuhan untuk mandiri sehingga dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan hidup pesantren. Kedua, adanya amanah yang harus dijalankan baik dari pemerintah sebagai ulil amri yaitu UU no. 18 tahun 2019 dan pendiri pondok pesantren sendiri, yang tertuang dalam akta pendirian no. 20 tahun 2007.
Implementasi program: penerima program, tujuan, prosedur, pengelolaan dan fasilitas, dan sebagainya dalam rangka memberikan rincian program	a) Program pemberdayaan ditujukan untuk masyarakat umum khususnya di Pasuruan baik kota dan kabupaten dan sekitarnya. Masyarakat yang diberdayakan tidak dihalangi oleh tempat tinggal mereka. Pemberdayaan memprioritaskan masyarakat laki-laki yang belum memiliki pekerjaan karena terdapat landasan kuat yang dipegang oleh pondok pesantren. b) Tujuan pemberdayaan adalah membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang menjadi tujuan pendirian pesantren.

	<p>c) Pengelolaan dilakukan oleh sumber daya yang ikhlas, amanah, dan kompeten.</p> <p>d) Fasilitas berhubungan dengan pendayaan yang mana masyarakat yang diberdayakan disana mendapatkan gaji, bonus, reward, kelengkapan kerja tanpa membayar. Sebagian lagi ada yang mendapatkan makanan, tempat penginapan.</p> <p>e) Selengkapny terdapat dalam komponen <i>process</i>.</p>
Dampak program: Penilaian secara komprehensif terhadap komponen CIPP	Secara keseluruhan, komponen tersebut dapat mendukung terimplementasinya program pemberdayaan dan hasilnya adalah positif bagi seluruh pihak yang terlibat. Namun, dibutuhkan upaya lebih untuk terus melakukan perbaikan dan juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat.

Sumber: Ilustrasi penulis

Disamping itu, terdapat pertanyaan tambahan yang dapat mendukung model evaluasi sumatif CIPP yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Pertanyaan Pendukung

Pertanyaan	Keterangan
1. Apakah permasalahan yang ada penting untuk ditangani?	Kebutuhan sangat penting untuk ditangani karena pondok pesantren DALWA harus mencapai tujuan, visi dan misi yang mulia secara mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun.
2. Apakah upaya yang dipandu oleh rencana yang bisa dipertahankan?	Guna menyelesaikan permasalahan yang ada, upaya pemberdayaan masyarakat telah dipandu oleh rencana yang matang, namun masih harus dilakukan perbaikan secara terus-menerus agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
3. Apakah desain layanan dilaksanakan secara kompeten dan bisa dimodifikasi?	Setiap unit usaha di pondok DALWA didirikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren, tetapi juga untuk masyarakat umum. Sehingga mereka memiliki strategi- strategi agar dapat bersaing dengan usaha lain yang telah ada di tengah masyarakat.
4. Apakah usahanya berhasil?	Usaha yang dilakukan berhasil, dapat dilihat dari adanya empat bidang yang telah

	dijabarkan sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan unit usaha di pondok pesantren terus menerus berkembang dan jumlah masyarakat yang diberdayakan juga semakin banyak. Oleh karena itu, mulai tahun 2018 hingga saat ini terdapat wadah yang menaungi seluruh unit usaha pesantren yang disebut dengan DALWA Center.
--	--

Sumber: Ilustrasi penulis

V. SIMPULAN

Pesantren *Darullughah Wadda'wah*, Bangil memiliki unit usaha yang dikelola secara profesional dan terletak di pusat bisnis pesantren atau DALWA Center. Unit usaha pesantren tersebut terdiri dari hotel, ritel (*mart*), *tour and travel*, roti, ayam goreng (DFC). Latar belakang pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk kemandirian pesantren, adanya amanah dari pemerintah dan pesantren yang terdapat dalam aturan tertulis, serta menjadi pelaku dalam pengembangan ekonomi Islam di masyarakat (*Context*). Upaya tersebut membutuhkan modal awal berupa *ghiroh*, sumber daya manusia, *asset*, *goodwill*, dukungan dan sinergitas. Setelah modal tersedia, strategi yang baik seperti menyinergikan seluruh modal awal tersebut, melibatkan Allah SWT, dan senantiasa menanamkan nilai moral dalam menjalankan usaha (*Input*). Setelah itu, dilakukan serangkaian proses pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat sekitar yang terdiri dari kesadaran yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, pengkapasitasan dengan memberikan pelatihan dan *capacity building*. Terakhir adalah pendayaan

dengan memberikan gaji, bonus, penghargaan, dan fasilitas tertentu sesuai dengan kebijakan unit usaha pesantren (Process). Rangkaian proses pemberdayaan tersebut ternyata mampu memberikan dampak yang positif terhadap empat bidang yaitu bidang bina manusia, usaha, lingkungan, dan kelembagaan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak yang diberdaya, tetapi juga terhadap pondok pesantren sebagai pemberdaya. (Product).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi., Beni. (2014). *Metode penelitian ekonomi islam (muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Fahmi., Neni. (2019). The practice of local economic development and maqasid al-shari'ah: Evidence from pesantren in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 625-642. DOI: <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2018-0279>
- Arfianto, A. E. W., Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, 2(1), 53-65. DOI: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi: (Sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Hasan., Azis. (2018). *Pembangunan ekonomi & pemberdayaan masyarakat strategi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi lokal*. Makassar: CV Nur Lina.
- Hendra, Tomi. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif al-qur'an. *Hikmah*, 11(2), 191-213.
- Setiawan, Asep Iwan. (2012). Dakwah berbasis pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mad'u. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 6(2), 347-362. DOI: <https://doi.org/10.15575/idajhs.v6i2.342>
- Kementerian Agama RI. (2012). *Robbani: Al-Qur'an per kata, tajwid warna*. Jakarta: Surprise.
- Keluarga Besar Al Hasaniyah. (2012). *Biografi sang Murobbi: Abuya Al Ustadz Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun*. Bangil: Ikatan Alumni Darullughah Wadda'wah Al-Hasaniyah.
- Kholiq, Abdul. (2012). Pendayagunaan Zakat, Infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota Semarang. *Riptek*, 6(1), 39-47.
- Marlena, Sela. (2014). *Pemberdayaan UMKM melalui CSR: Studi pada program CSR Bank Indonesia Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Muhammad. (2008). *Metodologi penelitian ekonomi Islam pendekatan kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nadzir, Mohammad. (2015). Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren. *Economica*, 6(1), 37-56.
- Ni'am, Syamsun. (2015). Pesantren: The miniature of moderate islam in Indonesia. *IJIMS: Indonesia Journal of Islam dan Muslim Societies*, 5(1), 111-134.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177-181.
- Putra, Ulfi. (2019). Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif al-qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32-44.
- Qolbi, Nur. (2018). Kembangkan ekonomi syariah, BI andalkan unit usaha pesantren. <https://nasional.kontan.co.id/news/kembangkan-ekonomi-syariah-bi-andalkan-unit-usaha-pesantren>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20.02.

- Rahardjo, M. (2017). *Apakah metode studi kasus ilmiah?*. Makalah Materi Kuliah Metodologi Penelitian Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Saeful, Pupu. (2009). Penelitian kualitatif. Malang: *Jurnal Equilibrium*, 5(9), 1-8.
- Saputro, Endy. (2011). Muslim localizing democracy: A non-pesantren village in Madura as a preliminary study. *IJIMS: Indonesia Journal of Islam dan Muslim Societies*, 1(2), 297-316.
- Schaurhofer, Martin., Markus. (2015). Autonomy: Starting point and goal of personal and social change, a constructivist perspective on knowledge management in empowerment processes. *Kybernetes*, 34(1/2), 261-277.
- Soeharto, Muhaad. (2019). Korea tawarkan YPHI-DALWA bangun LPH di Seoul. <https://ihalal.id/korea-tawarkan-yphi-DALWA-bangun-lph-di-seoul/>. Diakses pada 23 Okt 2019 pukul 20.27
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Seri Sosial Humaniora*, 9(2), 57-65. DOI:10.7454/mssh.v9i2.122.
- Stufflebeam, Daniel. (2003). The CIPP model for evaluation. Makalah dipresentasikan pada The 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN), Western Michigan University.
- Walfajri, Maizal. (2018). Kemkop nilai pondok pesantren cukup strategis jadi pusat pemberdayaan ekonomi. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kemkop-nilai-pondok-pesantren-cukup-strategis-jadi-pusat-pemberdayaan-ekonomi>. Diakses pada 22 Oktober 2019 pukul 20.14.
- Yatmo, Mardi. (2000). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi: Tinjauan teoritik dan implementasi. *Naskah*, 22(Juni-Juli), 1-11.
- Yin, Robert. (2014). *Case study research: Design and methods*. USA: Sage Publications, Inc.
- Zakaria, Gamal Abdul Nasir. (2010). Pondok pesantren: Changes and its future. *Journal of Islamic and Arabic Education*, 2(2), 45-52.
- Zhang, Guili, dkk. (2011). Using the Context, Input, Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a comprehensive framework to guide the planning, implementation, and assessment of service-learning programs. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 15(4), 57-83.
- Zulhimma. (2013). Dinamika perkembangan pondok pesantren di Indonesia. *Darul 'Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 1(2), 165-181.